



The Power Of Empowerment

Pemberdayaan, adalah upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada sumberdaya individu dan masyarakat serta organisasi agar bisa berperan meningkatkan posisi sosial, ekonomi, budaya, politik dan hukum

**THOMAS BUSTOMI
MERDI HAJIJI**



KATA PENGANTAR

Persoalan utama sumberdaya manusia Indonesia terletak pada: Kurangnya Pemberdayaan (*empowering*) Lemahnya Akal Budi atau kemampuan kreatif dan inovatif dan belum terpenuhinya restrukturisasi yang terdiri dari pedoman, persyaratan prosedur, kriteria, standarisasi, sertifikasi, kelembagaan, pendidikan dan kemitraan. Pentingnya Pemberdayaan menyangkut tentang apa itu pemberdayaan dan apa yang harus diberdayakan? Tentang apa yang harus diberdayakan jawabannya adalah sumberdaya. Dalam ekonomi dan manajemen disebut faktor-faktor sumberdaya/faktor produksi yang dimiliki.

Selanjutnya dalam perspektif pembangunan, pemberdayaan merupakan sebuah proses pengembangan kapasitas masyarakat dalam jangka panjang sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan masyarakat. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus bisa menjadi solusi dalam penerapan kebijakan pemberdayaan masyarakat agar masyarakat mampu menghadapi berbagai tantangan yang semakin berat dalam berkompetisi. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah mampu untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari pembangunan yang akan dilakukan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

Pemberdayaan masyarakat yang merupakan derivasi dari perspektif *people centered development* merupakan anti tesis dari pendekatan sebelumnya yang bersumber dari perspektif pertumbuhan. Di banyak Negara yang sedang berkembang perspektif pertumbuhan ini sering berkolaborasi dengan pendekatan stabilitas terutama stabilitas politik dan keamanan. Dengan demikian dapat dimaklumi apabila dalam operasionalisasinya Negara/pemerintah merupakan pemegang kendali dan kontrol utama. Sebagaimana juga sudah banyak disinggung di depan, implementasinya tertuang dalam pendekatan yang bersifat sentralistis, *top-down* dan berorientasi keseragaman (*uniformity*). Sebagai anti tesis dari perspektif pertumbuhan, maka dalam proses pemberdayaan masyarakat pendekatan yang digunakan cenderung merupakan kebalikannya.

Buku *The Power Of Empowerment* ini menggambarkan pemberdayaan secara teoritik dan empirik serta menguraikan fungsi dan proses pemberdayaan serta bagaimana peran Pemerintahan dalam Pemberdayaan Masyarakat sebagai gejala sosial yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu hubungan antara manusia dengan setiap kelompok termasuk dalam keluarga. Semoga buku ini memberikan gambaran dan menjadi pedoman bagi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pemberdayaan di masyarakat kita.

Bandung, April 2020

Hormat Kami,

Penulis

The Power Of Empowerment

Pemberdayaan, adalah upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada sumberdaya individu dan masyarakat serta organisasi agar bisa berperan meningkatkan posisi sosial, ekonomi, budaya, politik dan hukum

**THOMAS BUSTOMI
MERDI HAJIJI**

Penerbit :

**CV. CENDEKIA PRESS
Bandung**

THE POWER OF EMPOWERMENT

Pemberdayaan, adalah upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada sumberdaya individu dan masyarakat serta organisasi agar bisa berperan meningkatkan posisi sosial, ekonomi, budaya, politik dan hukum.

Copyright © 2020

Penulis : Thomas Bustomi
Merdi Hajiji
Editor : Merdi Hajiji
Desain Sampul : Agus Prawira
Penata Letak : Agus Prawira

CP. UM074-2020
ISBN: 978-623-7438-82-3
Cetakan pertama, April 2020

Diterbitkan oleh:

CV CENDEKIA PRESS
NIB: 8120107982776
Komp. GBA Barat Blok C-4 No. 7 Bandung

Anggota IKAPI

Hak cipta dilindungi undang-undang pada penulis, dan hak penerbitan pada CV Cendekia Press. Dilarang memperbanyak tulisan ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari Penerbit.

	PEMBERDAYAAN SEBAGAI PROSES PENGUATAN INDIVIDU	41
	PEMBERDAYAAN SEBAGAI PROSES PENGUATAN KELEMBAGAAN	43
	PEMBERDAYAAN SEBAGAI PROSES PENGUATAN JEJARING	44
BAGIAN TIGA	PEMBERDAYAAN DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK	45
	FUNGSI PEMERINTAHAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	45
	KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	47
	DESENTRALISASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	50
	METODE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	56
	INOVASI DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	72
	LEMBAGA KEMASYARAKATAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	83
	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INOVASI DALAM PEMBERDAYAAN: KASUS PROGRAM INOVASI PEMBANGUNAN DAN PEMNERDAYAAN MASYARAKAT (PIPPK) DI KOTA BANDUNG	92
	EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	103
BAGIAN EMPAT	STRATEGI MASYARAKAT DALAM MENDORONG PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	119
	KOMITMEN POLITIK DAN DEMOKRATISASI ANGGARAN	119

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	PARTISIPASI MASYARAKAT	123
	PENYUSUNAN ANGGARAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
BAGIAN LIMA	PEMBERDAYAAN DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	127
	KEKUATAN PEMBERDAYAAN DALAM PENGEMBANGAN ORGANISASI	127
	SIAPA BUTUH PEMBERDAYAAN?	128
	PERENCANAAN PEMBERDAYAAN SDM	137
	PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM	141
	STRATEGI PEMBERDAYAAN SDM	143
	KAPASITAS SDM	146
	CARA PEMBERDAYAAN SDM	147
	PEMBERDAYAAN MELALUI PELATIHAN	149
	BAGAIMANA MELAKUKAN PEMBERDAYAAN DI PERUSAHAAN	151
	KEBUTUHAN PEMBERDAYAAN DALAM MANAJEMEN BISNIS	152
	PENTINGNYA PEMBERDAYAAN DALAM BISNIS MODERN	156
	MOTIVASI BERPRESTASI DALAM PEMBERDAYAAN	156
BAGIAN ENAM	ANTITESIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	171
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI ARUS UTAMA	171
	PROSES PEMBERDAYAAN	183
	OPERASIONALISASI KONSEP	187
	DAFTAR PUSTAKA	197

Proses belajar dalam pemberdayaan bukanlah proses "mengguru" melainkan menumbuhkan semangat belajar bersama yang mandiri dan partisipatif (Mead, 1959). Sehingga keberhasilan pemberdayaan bukan diukur dari seberapa jauh terjadi transfer pengetahuan, keterampilan atau perubahan perilaku, tetapi seberapa jauh terjadi dialog, diskusi, dan pertukaran pengalaman (*sharing*). Karena itu, antara fasilitator dan peserta sebagai penerima manfaat dalam kedudukan yang setara yang saling membutuhkan dan saling menghormati. Di sini fasilitator tidak harus lebih pintar atau pejabat yang lebih berkuasa, tetapi dapat berasal dari orang biasa yang memiliki kelebihan atau pengalaman yang layak dibagikan.

Pemberdayaan sebagai proses pembelajaran, harus berbasis dan selalu mengacu kepada kebutuhan masyarakat, untuk mengoptimalkan potensi dan sumberdaya masyarakat serta diusahakan guna sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat yang diberdayakan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu fungsi pemerintahan. Fungsi tersebut dilakukan oleh pemerintah pada setiap levelnya. Dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia, fungsi pemberdayaan menjadi urusan pemerintahan yang sifatnya konkurent. Desentralisasi yang menempatkan daerah sebagai pemilik hak untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya memiliki kewajiban untuk memberdayakan rakyatnya, baik dalam konteks sosial, ekonomi, politik dan budaya. Keberhasilan otonomi diindikasikan oleh beberapa faktor, beberapa diantaranya kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui berbagai kebijakan pemberdayaan. Berkaitan dengan desentralisasi maka wujud pemberdayaan masyarakat adalah adanya kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat di daerah, bahkan pada tataran tertentu kebijakan yang bersifat proteksi sehingga masyarakat dapat mengembangkan seluruh kemampuan untuk memperoleh kesejahteraannya.

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vii
BAGIAN SATU	
PENDAHULUAN	1
PEMBANGUNAN BERBASIS PEMBERDAYAAN	2
FALSAFAH DAN PRINSIP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	4
KONSEP PEPPERDAYAAN MASYARAKAT	10
BIAS-BIAS KONSEP PEPPERDAYAAN MASYARAKAT	15
DILEMA PEPPERDAYAAN MASYARAKAT	17
PEPPERDAYAAN MEMADUKAN PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN	19
BAGIAN DUA	
PEPPERDAYAAN SEBAGAI PROSES	23
PEPPERDAYAAN SEBAGAI PROSES	25
PEPPERDAYAAN SEBAGAI PROSES PEMBELAJARAN	29
PEPPERDAYAAN SEBAGAI PROSES PENGUATAN KAPASITAS	31
PEPPERDAYAAN SEBAGAI PROSES PERUBAHAN SOSIAL	33
PEPPERDAYAAN SEBAGAI PROSES PENGEMBANGAN MASYARAKAT	34



PRAKATA

Secara teoritis, perubahan terencana yang dilaksanakan melalui pemberdayaan, dapat dilakukan dengan melakukan pemaksaan, ancaman, bujukan, atau pendidikan. Perubahan melalui pemaksaan atau ancaman, memang dapat terwujud dalam waktu yang relatif cepat sesuai dengan yang diharapkan. Tetapi, perubahan seperti itu hanya dapat terus bertahan manakala pemaksaan atau ancaman dapat terus dijaga keberlanjutannya. Jika kekuatan pemaksa atau pengancam mengendor, maka keadaan yang sudah berlangsung akan segera terhenti dan kembali seperti sediakala, seperti sebelum dilakukan perubahan. Perubahan yang dilakukan melalui bujukan atau pemberian insentif tertentu, juga dapat berlangsung cepat secepat pemaksaan atau ancaman. Tetapi, perubahan yang berlangsung melalui bujukan dalam waktu panjang justru akan menciptakan ketergantungan, karena bujukan atau pemberian insentif akan mematikan keswadayaan masyarakat. Sebaliknya, perubahan melalui proses pendidikan atau proses belajar, seringkali berlangsung lambat, tetapi perubahan yang terjadi akan berlangsung mantap dan lestari.

Oleh sebab itu, inti dari kegiatan pemberdayaan yang bertujuan untuk mewujudkan perubahan adalah terwujudnya proses belajar yang mandiri untuk terus menerus melakukan perubahan. Dengan perkataan lain, pemberdayaan yang didesain sebagai proses belajar, atau dalam setiap upaya pemberdayaan, harus terkandung upaya-upaya pembelajaran atau penyelenggaraan pelatihan, dll.

Dalam kaitan ini, keberhasilan pemberdayaan tidak diukur dari seberapa banyak ajaran yang disampaikan, tetapi seberapa jauh terjadi proses belajar bersama yang dialogis, yang mampu menumbuhkan kesadaran (sikap), pengetahuan, dan keterampilan "baru" yang mampu mengubah perilaku kelompok sasarannya ke arah kegiatan dan kehidupan yang lebih mensejahterakan setiap individu, keluarga, dan masyarakatnya. Jadi, pemberdayaan adalah proses belajar bersama.



Thomas Bustomi, Pada tahun 2006, Penulis lulus Program Doktor dari Universitas Padjajaran Bandung Bidang Kajian Utama Administrasi Publik. Dosen Tetap Program Studi Administrasi Publik di FISIP dan Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung, Dosen Tidak Tetap Pascasarjana di UPMI Medan, Pascasarjana Universitas Terbuka dan SESKOAD Bandung. Assesor BAN PT DIKTI RI sejak 2008, Pengurus International Association for Public Administration (IAPA) Jawa Barat dan Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (AsIAN),

menerbitkan buku-buku referensi: Pengantar Pengembangan Organisasi, Peran Manajemer Publik, dan Dinamika Anggaran Pembangunan Desa serta Penulis di Jurnal Internasional dan Nasional. Sejak tahun 2005 menjadi Konsultan Tenaga Ahli Otonomi Daerah di Word Bank, UNDP, Kementerian RI, dan Pemerintah Daerah. Pada Juli 2015 mengikuti International Conference Social and Economic Higher Education Forum di Thailand, November 2015, menjadi salah satu Delegasi Indonesia pada International Workshop Public Transportation, di Belanda dan Paris, dan tahun 2018 menjadi Penguji Eksternal Program Doktor Universitas Selangor Malaysia.

Merdi Hajiji, Lahir di Bandung pada tanggal 6 Juni 1972. Merdi Hajiji adalah Praktisi lembaga kemasyarakatan, dan pendamping Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta penggiat sosial kemasyarakatan, Disamping sebagai tenaga pengajar (Dosen) Merdi juga pernah dan aktif aktif di berbagai organisasi profesi seperti di Kadin Propinsi Jawa Barat sebagai komisi tetap bidang kewirausahaan dan Saat ini di Kadin Kota Bandung, disamping itu aktif juga di berbagai Lembaga Kemasyarakatan sebagai Ketua DPD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota



Bandung daritahun 2011 sampai sekarang, Satgas Gebrak Rentenir Jawa Barat, Klinik Konsultasi Usaha koperasi dan UMKM Jawa Barat, Perhimpunan Praktisi Hukum Indonesia, Sekretaris Jenderal IKA IKOPIN dan menjadi Tim Ahli bidang Pemberdayaan Koperasi di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Keterlibatan dalam program pemberdayaan diantaranya AVI Project USAID, Asia Foundation, PPK, P2KP, PNPM, Pendampingan Pertanian, P2KB, PIPPK, OPOP Jabar, Pendampingan Koperasi dan UMKM dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya.

ISBN 978-623-7438-82-3



9 786237 438823